



Peran Penatausahaan Aset Tetap untuk Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang

Rita Martini*, Dewanti Citra Arimbi, Kartika Rachma Sari

Politeknik Negeri Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang 30139

*ritamartini@polsri.ac.id, dewanticitraarimbi@gmail.com, kartikasyahrul@yahoo.co.id

doi.org/10.33795/jraam.v4i2.009

Informasi Artikel

Tanggal masuk	17-01-2020
Tanggal revisi	22-01-2020
Tanggal diterima	03-03-2020

Keywords:

Assets management
Government
Governance

Abstract

This research analyzes the effect of fixed asset administration on public accountability in the Regional Apparatus Organization of Palembang. This study analyzes the administration of fixed assets based on Permendagri Number 19 of 2016, including bookkeeping, inventory and reporting. Public accountability is assessed from the accountability of policies, programs, processes, honesty and law. Hypothesis testing was done by multiple linear analysis models. Research results are the inventory and reporting has a positive and significant influence while bookkeeping does not affect public accountability, and simultaneously has a significant effect.

Kata kunci:

Manajemen asset
Pemerintah
Tata kelola pemerintahan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap akuntabilitas publik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang. Penelitian ini menganalisis penatausahaan aset tetap, meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Akuntabilitas publik dikaji dari akuntabilitas kebijakan, program, proses, serta kejujuran dan hukum. Pengujian hipotesis dilakukan dengan model analisis linear berganda. Penelitian menghasilkan inventarisasi dan pelaporan berpengaruh, tetapi pembukuan tidak berpengaruh, terhadap akuntabilitas publik pemerintah Kota Palembang, dan secara bersama-sama mempengaruhi akuntabilitas publik.



1. Pendahuluan

Pemerintah daerah wajib melaksanakan pengelolaan keuangan [1] berlandaskan sistem pengendalian intern guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik [2]. Salah satu lingkup pengelolaan yaitu penatausahaan aset tetap, meliputi

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tujuannya sebagai dasar pemerintah daerah (Pemda) menyusun neraca, merencanakan kebutuhan/pengadaan, dan memelihara Barang Milik Daerah (BMD). Selanjutnya digunakan untuk rencana anggaran dan pengadministrasian BMD. Penatausahaan

aset tetap yang baik [3] akan meningkatkan kualitas informasi, sehingga dapat memudahkan Pemda dalam penggunaan dan pemanfaatan aset tersebut.

Keberagaman data pencatatan aset memunculkan masalah dalam penatausahaan. Pemda harus serius dalam menanganinya [3] sebab tidak semua data telah lengkap atau dimiliki dengan benar, dan pencatatannya belum terintegrasi. Dengan tidak adanya data yang terintegrasi, maka sangat menyulitkan dalam membuat status neraca yang dapat meyakinkan *stakeholder* mengenai aset (lokasi, jumlah, pengguna, spesifikasi dan nilai) [3]. Pemda memiliki jenis dan jumlah aset yang beragam. Aset daerah yang besar nilai ekonomisnya, fisiknya bervariasi, dan berada diberbagai lokasi, akan menimbulkan kompleksitas dan permasalahan jika lemah dalam pengelolaan dan pengawasannya [3] dan [4].

Kuasa, pengguna, dan pengelola barang membukukan penguasaan penggunaannya dalam: 1) Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), 2) Daftar Barang Pengguna (DBP), dan 3) Daftar BMD. Inventarisasi merupakan rangkaian pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan [3] [5]. Dalam pelaksanaan proses pelaporan, pihak-pihak tersebut memerlukan hasil pembukuan dan inventarisasi. Hasil penatausahaan digunakan dalam penyusunan neraca Pemda.

Aset-aset pemerintah kota (Pemkot) Palembang belum terkoordinir secara optimal, adanya sebagian barang yang lokasinya belum terdata serta belum tepatnya ketetapan peruntukannya [6]. Hal ini berdampak pada banyak aset yang tidak digunakan dan dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan penatausahaan aset-aset agar terwujudnya akuntabilitas publik. Pemkot dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palembang perlu mengelola keuangan negara dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas. Masih ditemukan berbagai permasalahan pengelolaan aset tetap, dimana adanya penggabungan catatan aset tetap, dan tidak diketahuinya keberadaan, dan pihak lain yang menguasainya [7].

Pemerintah diwajibkan untuk perhatian akan setiap faktor penting dalam pelaporan pertanggungjawabannya. Pemeriksaan kembali aset yang dikelola harus dilakukan, untuk memastikan pengelolaannya terutama perhatikan apa saja aset yang ada di daerahnya.

Kajian terdahulu berkaitan dengan penatausahaan aset [8] menyimpulkan pembukuan dan pelaporan aset tidak berpengaruh bagi akuntabilitas publik Pemda. Penelitian [8] mengindikasikan pembukuan dan pelaporan belum dilaksanakan secara optimal berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2007. Sedangkan pada analisis penelitian ini, penatausahaan aset tetap mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 [5], dari dimensi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Selanjutnya, akuntabilitas publik Pemkot Palembang khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ditinjau dari akuntabilitas kebijakan, program, proses, serta kejujuran dan hukum [9].

2. Metode

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan hubungan kausal asosiatif. Peneliti menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan akuntabilitas publik. Variabel dependen adalah akuntabilitas publik. Variabel independen yaitu: pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Sampel ditentukan secara *purposive*, yaitu: 1) merupakan pejabat yang memiliki pengetahuan tentang manajemen aset, serta pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap, 2) masa kerja minimal 2 tahun, dan 3) responden merupakan Kepala OPD, Sekretaris dan 2 staf bagian aset pada 30 OPD kota Palembang. Kuesioner akan dibagikan ke responden yang memenuhi kriteria pengambilan sampel, akan mewakili masing-masing OPD. Dengan demikian total sampel adalah 120 responden.

Hipotesis diuji untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel Pb, Inv, dan Plp terhadap AP. Pengujian hipotesis ini akan

menggunakan model regresi linier berganda [10], yaitu:

$$AP = a + b_1 Pb + b_2 Inv + b_3 Plp + e$$

Keterangan:

AP	= Akuntabilitas Publik
a	= Konstanta
$b_1 b_2 b_3$	= Koefisien Regresi
Pb	= Pembukuan
Inv	= Inventarisasi
Plp	= Pelaporan
e	= Faktor lain

Untuk mengetahui apakah secara parsial Pb, Inv dan Plp memiliki pengaruh atau tidak terhadap AP, maka akan digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan 2 sisi. Hipotesisnya:

1. $H_1 = Pb, Inv, \text{ dan } Plp$ asset tetap secara parsial tidak mempengaruhi AP.
2. $H_2 = Pb, Inv, \text{ dan } Plp$ asset tetap secara parsial mempengaruhi AP.

Ketentuan pengujian, adalah:

- Probabilitas > 0.05 : ditolak H_2 .
- Probabilitas < 0.05 : diterimanya H_2 .

Uji F [10], berguna mengetahui pengaruh Pb, Inv, dan Plp terhadap AP, dengan dugaan:

1. $H_1 = Pb, Inv, \text{ dan } Plp$ asset tetap secara bersamaan tidak mempengaruhi AP.
2. $H_2 = Pb, Inv, \text{ dan } Plp$ asset tetap secara bersamaan mempengaruhi AP.

Pengujian dilakukan dengan kriteria:

- Probabilitas > 0.05 : penolakan H_2 .
- Probabilitas < 0.05 : penerimaan H_2 .

Uji koefisien determinasi bertujuan mengukur sejauhmana Pb, Inv, dan Plp dapat menjelaskan variasi variabel AP, baik secara mandiri maupun bersamaan.

3. Hasil dan Pembahasan

Uji normalitas menghasilkan nilai residual yang normal serta pola distribusi

normal. Model regresi layak dipakai untuk memprediksi akuntabilitas publik berdasarkan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan ($0,336 > 0,05$). Nilai *tolerance* dari uji multikolinieritas variabel (Pb, Inv, dan Plp) menghasilkan tidak terjadi multikolinieritas. Tidak terjadi heteroskedastisitas karena dari uji heteroskedastisitas (dengan uji *Glejser*), diperoleh tingkat signifikansi Pb, Inv, dan Plp lebih dari 0,05, sehingga *t. Scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebar), artinya model regresi layak dipakai. Persamaan regresi (dari Tabel 1) yang diperoleh adalah:

$$AP = 17,115 - 0,410 Pb + 0,702 Inv + 0,635 Plp + e$$

Persamaan regresi tersebut menjelaskan:

1. Nilai konstanta 17,115, mengindikasikan apabila pembukuan, inventarisasi dan pelaporan memiliki nilai 0 maka akuntabilitas publik akan memiliki hasil sebesar 17,115 %.
2. Koefisien regresi pembukuan menghasilkan nilai -0,410, berarti adanya hubungan yang berlawanan arah antara pembukuan dengan akuntabilitas publik, artinya jika nilai pembukuan naik sebesar 1 maka nilai akuntabilitas publik turun 0,410%.
3. Koefisien regresi inventarisasi 0,702, artinya terdapat hubungan yang searah antara inventarisasi dengan akuntabilitas publik, jika nilai variabel inventarisasi naik sebesar 1, nilai akuntabilitas publik naik 0,702%.
4. Koefisien regresi pelaporan 0,635 menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pelaporan dengan akuntabilitas publik. Jika nilai pelaporan naik sebesar 1 maka nilai akuntabilitas publik naik 0,635%, asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Tabel 1. Output Pengujian Regresi

Variabel	Koefisien	Std. Error	T	Sig.
(Constant)	17,115	5,506	3,109	0,002
Pembukuan	-0,410	0,263	-1,556	0,123
Inventarisasi	0,702	0,278	2,526	0,013
Pelaporan	0,635	0,248	2,562	0,012

Sumber: *Output SPSS versi 22 (2019).*

Hasil uji statistik pada tabel 1 juga menginterpretasikan:

1. Signifikansi $0,123 > 0,05$, maka H_1 ditolak. Nilai t hitung -1,556 dengan nilai signifikansi 0,123, disimpulkan P_b tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap AP.
2. Signifikansi $0,013 < 0,05$ maka H_2 diterima, bermakna Inv mempengaruhi AP.
3. Signifikansi $0,012 < 0,05$ maka H_3 diterima, artinya AP dipengaruhi secara parsial oleh Plp.

Tabel 2 menunjukkan nilai F-hitung adalah 17,398 lebih besar dari F-tabel 2,689, sehingga secara simultan P_b , Inv, dan Plp berpengaruh positif dan signifikan terhadap AP.

Tabel 2. Hasil Uji F

F-tabel	Sig.	Keterangan
17,398	2,689	0,000
		Signifikan

Sumber: *Output SPSS versi 22 (2019)*

Nilai R^2 sebesar 0,307 menginterpretasikan sumbangan pengaruh pembukuan, inventarisasi dan pelaporan adalah 30,70% dengan kata lain hubungannya relatif rendah. Sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 69,30%.

Pengaruh Pembukuan terhadap Akuntabilitas Publik

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan akuntabilitas publik tidak dipengaruhi oleh pembukuan. Kondisi ini konsisten dengan [9] dimana pembukuan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Keberhasilan pengamanan aset daerah tidak dipengaruhi oleh pembukuan [11], karena pengguna dan pengurus barang di OPD tidak melaksanakan

pembukuan. Pembukuan [5] berisi proses pencatatan BMD.

Dalam praktiknya, Pemkot Palembang sudah melaksanakan pembukuan BMD yang merupakan proses pencatatan BMD, selanjutnya dicatat dalam daftar BMD. Akan tetapi peraturan daerah yang tersedia saat ini tidak mengatur mengenai pencatatan secara spesifik, sehingga membuat pencatatan menjadi kurang terstruktur, akibatnya aset tetap dicatat secara gabungan. Semua aset yang berasal dari sumber yang berbeda-beda pencatatannya dijadikan satu dan tidak dibedakan sehingga menyebabkan kerancuan dalam perlakuan terhadap aset itu sendiri dan sebagian besar pegawai sub bidang aset tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Pengaruh Inventarisasi terhadap Akuntabilitas Publik. Buku inventarisasi dihasilkan dari kegiatan inventarisasi, menampilkan keseluruhan aset daerah yang bergerak ataupun tetap. Kegiatan inventarisasi sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan oleh Pemkot Palembang. Kenyataan ini dibuktikan dengan Buku Induk Inventarisasi, Buku Inventarisasi, KIB dan KIR. Walaupun dalam praktiknya masih kurang baik karena belum jelasnya alamat dan peruntukan beberapa barang milik Pemda sehingga aset tersebut tidak digunakan dan dikelola maksimal.

Inventarisasi mempengaruhi pengamanan BMD [12], dan inventarisasi [9] berpengaruh signifikan bagi akuntabilitas publik. Informasi aset Pemda yang berkualitas dapat diperoleh dari kegiatan inventarisasi. Prinsip *good governance* mengarahkan pemerintah (pusat/daerah) untuk transparan dan akuntabel dalam penyajian laporan keuangan [13]. Tujuannya agar masyarakat dapat memperoleh

pertanggungjawaban dari semua yang dilaporkan pemerintah [14], termasuk BMN/BMD.

Pengaruh Pelaporan terhadap Akuntabilitas Publik. Setiap OPD telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun masih belum tepat waktu dikarenakan adanya kendala dalam proses sebelumnya yaitu pembukuan dan inventarisasi. Pemkot Palembang telah berusaha memaksimalkan kinerjanya dalam upaya pelaksanaan pengelolaan barang. Kondisi ini terlihat dari hasil pelaporan yang telah memuat seluruh dokumen wajib seperti buku inventarisasi, rekap buku inventarisasi, daftar mutasi barang yang menjadi dasar penyusunan neraca Pemda.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya [11] bahwa pelaporan BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan BMD. Namun, tidak sejalan dengan [9], pelaporan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan terhadap Akuntabilitas Publik. Akuntabilitas publik dipengaruhi oleh pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan. Pengelolaan aset tetap terdiri dari beberapa siklus, dan dari siklus tersebut penatausahaan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan sebab sangat bermanfaat bagi siklus lainnya. Apabila penatausahaan aset tetap dilaksanakan dengan baik, maka pengambilan keputusan terkait masing-masing siklus pengelolaan aset tetap yang lain akan optimal [1] [2]. Oleh karena itu, Pemkot Palembang harus menjaga dan mempertahankan konsistensi dalam upaya pelaksanaan pengelolaan aset tetap guna terwujudnya akuntabilitas publik yang baik.

Pembuktian tersebut mendukung berbagai penelitian [11][15][16] bahwa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD berpengaruh signifikan terhadap pengamanan BMD. Sedangkan penelitian sebelumnya [17] [18] menyatakan pengaruh pembukuan, inventarisasi dan pelaporan masih relatif rendah.

4. Kesimpulan

Inventarisasi dan pelaporan aset tetap berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, sedangkan pembukuan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap mempengaruhi akuntabilitas publik Pemkot Palembang. OPD pada Pemkot Palembang diharapkan untuk meningkatkan akuntabilitas publik terutama berkaitan dengan aspek pembukuan aset tetap. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah populasi dan sampel agar hasilnya lebih dapat digeneralisir. Selain itu diharapkan untuk mencari dan menggunakan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi akuntabilitas publik, misalnya penerapan teknologi informasi, dan efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

Daftar Rujukan

- [1] R. Martini, R. Agustin, A. Fairuzdita and A. N. Murinda, "Pengelolaan keuangan berbasis aplikasi sistem keuangan daerah," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 25, no. 2, pp. 69-74, 2019. doi: 10.24114/jpkm.v25i2.13916.
- [2] R. Martini, N. Lianto, S. Hartati, Z. Zulkifli and E. Widyastuti, "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa," *Jurnal Akademi Akuntansi*, vol. 2, no. 1, pp. 106-123, 2019. doi: 10.22219/jaa.v2i1.8364.
- [3] Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- [4] R. Martini, Z. Zulkifli, S. Hartati and R. Armaini, "Pembukuan dan Pelaporan Informasi Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK 45: pada Panti Asuhan Al-Amanah," *Aptekmas*, vol. 2, no. 1, pp. 15-22, 2018. doi: 10.36257/aps.v1i2.1205

- [5] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Jakarta, 2016.
- [6] Klikanggaran. (2018, April 27). *Tim Berita*. Retrieved from <https://klikanggaran.com/anggaran/walikota-palembang-ke-mana-milyaran-aset-tidak-diketahui-keberadaannya.html>
- [7] Permata, Efen. (2018, September 14). Retrieved from <https://www.detiksumsel.com/bpk-temukan-5-permasalahan-di-palembang>
- [8] J. Imbiri, "Pengaruh Inventarisasi, Pembukuan, Pelaporan Aset terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Waropen)," *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, vol. 1, no. 2, pp. 34-62, 2018.
- [9] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2018.
- [10] D. I. Priyatno, *SPSS Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa & Umum*, Yogyakarta: Andi, 2018.
- [11] F. M. Simamora, "Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat," 2011.
- [12] I. W. Abas, "Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 1, no. 1, pp. 1-10, 2013.
- [13] R. Martini, K. R. Sari and R. S. Wardhani, "Analisis Penerapan Good University Governance melalui Efektivitas Pengendalian Intern & Komitmen Organisasional," in *Simposium Nasional Akuntansi 18*, Medan, 2015.
- [14] R. Martini, A. Resy and Z. Zaliah, "Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan: dari kontribusi retribusi pasar," *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, vol. 5, no. 1, pp. 58-71, 2019. doi: 10.31957/keuda.v4i2.870.
- [15] A. Bokingo, "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Boul)," *Jurnal Katalogis*, vol. 5, no. 12, pp. 43-54, 2017.
- [16] Choiruddin, Zulkifli, R. Martini, and H. Winarko, "Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk Pengamanan Barang Milik Daerah," *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, vol. 3, no. 1, pp. 1-10, 2019.
- [17] S. Febrianti, "Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Kubu Raya," *Jurnal Ekonomi Manajemen*, vol. 10, no. 1, pp. 151-171, 2016.
- [18] S. Hartati, R. Martini, and H. Winarko, "Manajemen Aset bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang)," *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, vol. 3, no. 1, pp. 40-51, 2019.

